

Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng

Fadhil Surur

Laboratorium Keahlian Perencanaan Tata Ruang Pesisir dan Kepulauan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Abstrak

Kecamatan Pajukukang merupakan kecamatan dengan tingkat produksi perikanan tertinggi di Kabupaten Bantaeng. Kebijakan RTRW Kabupaten Bantaeng menetapkan Kecamatan Pajukukang sebagai kawasan pengembangan budidaya perikanan, ke depan potensi tersebut dapat lebih dioptimalkan. Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun arahan pemanfaatan ruang dalam mendukung kegiatan budidaya perikanan. Komponen data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis fungsi kawasan, analisis kesesuaian lahan dan analisis perkembangan wilayah. Berdasarkan hasil analisis diperoleh fungsi kawasan peruntukan budidaya lebih dominan dan nilai IKL dalam kondisi yang kurang optimal, kesesuaian lahan S1 atau sangat sesuai mencapai 367,75 ha, dan Kelurahan Biangkeke dengan tingkat perkembangan wilayah tertinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pengembangan kawasan budidaya perikanan antara lain dengan meningkatkan alternatif lahan fungsi lindung, mengoptimalkan lahan nilai S1 serta meningkatkan peran Kelurahan Biangkeke sebagai pusat pengembangan agribisnis perikanan.

Kata-kunci : perikanan, lahan, kawasan, arahan

Pengantar

Indonesia terkenal dengan sebutan *geographic is destiny*, dimana secara alami merupakan negara kepulauan. Penegasan UUD 1945 Pasal 25 A bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dalam undang-undang". Sehingga menjadi kewajiban bagi seluruh bangsa untuk memanfaatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pesisir dan laut.

Dinamika wilayah pesisir yang terus berkembang, mendorong upaya pemenuhan kebutuhan akan lahan untuk berbagai aktivitas. Konversi lahan yang terjadi menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan lingkungan, disisi lain penduduk membutuhkan lahan untuk segala aktivitasnya. Dalam hal ini perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik antara pemanfaatan

lahan budidaya dengan pengelolaan kawasan lindung setempat.

Kendala lingkungan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya diantaranya penataan wilayah atau penataan ruang pengembangan budidaya yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan akibat pengelolaan yang tidak tepat. Sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu yang panjang. Analisa daya dukung lahan perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kesesuaian lahan budidaya tambak di pesisir (Suparjo, 2008; Panjara, 2004; Sutanto, 2005).

Kecamatan Pajukukang merupakan salah satu dari 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng. Jumlah produksi perikanan tercatat 5.258,4 ton yang mencakup 5.124,58 budidaya laut, 132,61 ton tambak, dan 1,19 untuk kolam. Komoditi perikanan yang dominan antara lain udang,

rumput laut, dan bandeng. Sehingga menjadikan Kecamatan Pajukukang sebagai kecamatan dengan potensi perikanan terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Potensi tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bantaeng yang menetapkan Kecamatan Pajukukang sebagai kawasan pengembangan budidaya perikanan. Peningkatan produksi ini kedepan sangat dimungkinkan, dengan dasar luas lahan yang tersedia untuk budidaya tersedia dalam jumlah besar, selanjutnya komoditi yang telah berhasil dibudidayakan cukup beragam.

Sebagai kawasan pesisir yang terus berkembang, pengaturan dan pengelolaan lahan pesisir Kecamatan Pajukukang perlu dilakukan mengingat banyaknya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan sebagai upaya untuk memaksimalkan produksi perikanan dan kelautan. Sehingga tulisan ini diharapkan bermanfaat dalam 1) mengetahui potensi lahan, 2) mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk tambak, 3) menetapkan pusat pelayanan kawasan serta 4) menyusun arahan dalam pengembangan kawasan budidaya perikanan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan data kuantitatif dan analisis yang sesuai dengan ketersediaan data. Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data observasi yang sifatnya hasil pemantauan dilapangan, data instansional hasil dari kunjungan pada instansi terkait serta data kepustakaan melalui literatur yang terkait dengan studi yang akan dilakukan.

Metode Analisis Data

Proses analisis data mencakup 3 unit analisis sebagai alat untuk menjawab tujuan penelitian.

Adapun unit analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

Analisis Fungsi Kawasan

Penentuan zona lindung dan zona budidaya di Kecamatan Pajukukang didasarkan pada SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No. 683/KPTS/UM/8/1982. Metode ini menghasilkan suatu perwilayahan kelayakan lahan yang dapat dibudidayakan dan tidak dapat dibudidayakan (area lindung). Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Klasifikasi Fungsi Lahan

No	Klasifikasi	Skor
1	Kawasan Lindung	>175
2	Kawasan Penyangga	125 – 174
3	Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan	<125
4	Kawasan Budidaya Tanaman Semusim	<125

Sumber : SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No. 683/KPTS/UM/8/1982

Hasil dari penghitung fungsi kawasan, kemudian dilanjutkan nilai Indeks Kemampuan Lindung (IKL_{Pajukukang}) sebagai parameter untuk mengetahui proporsi peruntukan kawasan lindung terhadap luas wilayah atau peruntukan lahan secara keseluruhan. Asumsi kondisi ideal mencapai 30% dari luas wilayah, maka formula yang digunakan adalah :

$$IKL = \frac{LKL}{0,3x(LKL + LKB)} \times 100\%$$

Keterangan: IKL_{Pajukukang} = Indeks Kemampuan Lindung, LKL = luas kawasan lindung, LKB = Luas kawasan budidaya, dan LW : luas wilayah.

Analisis Kesesuaian Lahan Budidaya Perikanan

Analisis tumpang susun (*overlay*) untuk memperoleh tingkat kesesuaian lahan budidaya tambak didasarkan pada kriteria (Pantjara *et, al* 2006). Penentuan kelas kesesuaian lahan mengacu pada hasil perhitungan. Metode ini digunakan untuk mempermudah melihat ringkasan data melalui pengelompokan nilai kelas kesesuaian yaitu : S1 =4, S2=3, S3=2, dan N=1.

Matriks kesesuaian lahan tambak udang terdiri dari 8 parameter yang ditampilkan pada Tabel 2. Kemudian parameter pada matriks yang ada pada tabel tersebut untuk menggabungkan beberapa matriks tersebut.

Tabel 2. Parameter Kesesuaian Lahan untuk Tambak

Parameter	Bobot	S1	S2	S3	N
Land use	20	Tanbak, Sawah, Hutan Pantai (4)	Kebun, Hutan, Rawa/ Mangrove (3)	Hutan Lindung, Area Pertambangan (2)	Perumahan dan bangunan (1)
Struktur Tanah	13	Halus (4)	Halus dan Kasar (3)	Kasar (2)	Pasir (1)
Jenis Tanah	13	Aluvial (4)	Entisol (3)	Inceptisol (2)	Ultisol (1)
Kelerengan Lahan (%)	12	0-3(4)	3-6 (3)	6-9 (2)	>9 (1)
Jarak Dari Garis Pantai (m)	10	300-500 (4)	500-400 (3)	100-300 (2)	<100 dan >4000 (1)
Jarak Dari Sungai (m)	10	50-500 (4)	500-1000 (3)	1000-1500 (2)	<50 dan >1500 (1)
pH	10	6,5-8,5 (4)	5,5-6,5 dan 8,5-9,5 (3)	4,0-5,5 dan 9,5-10,5 (2)	<4,0 dan >10,5 (1)
Salinitasi %	10	15-25 (4)	25-30 (3)	5-15,30-35 (2)	<5 dan >35 (1)

Sumber : dimodifikasi dari Pantjara (2008); dan Hardjowigeno dan Widiatmaka (2001)

Analisis Hirarki Pengembangan Wilayah

Untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah yakni menggunakan analisis skalogram, dimana metode ini mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana pola fungsi/fasilitas pelayanan, sosial ekonomi yang terdapat pada berbagai tingkatan perkotaan/pusat pelayanan dan bagaimana pola tersebut melayani kebutuhan penduduk di wilayah yang ditinjau. Metode perhitungan indeks tingkat perkembangan wilayah digunakan untuk membandingkan tingkat atau derajat perkembangan kelurahan yang terdapat pada suatu wilayah dengan menggunakan beberapa indikator sosial-ekonomi.

Hasil perhitungan indeks tingkat perkembangan wilayah dikelompokkan kedalam tiga kategori. Kelompok dengan indeks perkembangan tertinggi diinterpretasikan sebagai kelurahan yang memiliki tingkat perkembangan terbaik dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Kelompok dengan indeks perkembangan menengah merupakan kelurahan dengan tingkat perkembangan sedang. Sedangkan yang terakhir, yaitu kelompok yang memiliki nilai terkecil merupakan kelompok kelurahan yang memiliki tingkat per-

kembangan terbelakang dibandingkan dengan kelurahanlainnya.

Analisis dan Interpretasi

Berdasarkan ketersediaan data maka hasil yang diperoleh dari kajian ini sebagaimana tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

Penetapan Fungsi Kawasan

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.837/KPTS/UM/1982 tentang kesesuaian pemanfaatan lahan yang menjadi dasar arahan pemanfaatan lahan. Kriteria tersebut merupakan dasar untuk menentukan nilai skor dengan indikator yang dinilai meliputi; kelerengan, jenis tanah dan intensitas curah hujan.

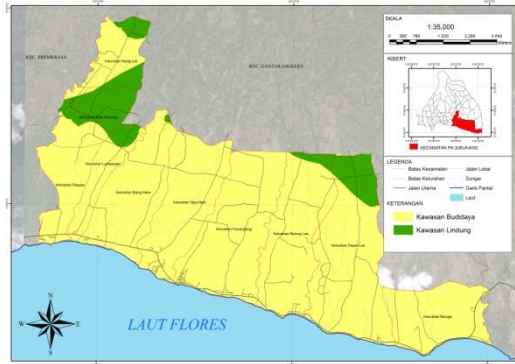
Maka diperoleh nilai skor klasifikasi fungsi lahan, baik fungsi lindung, penyangga dan budidaya. Hasil akhir menunjukkan bahwa di kawasan perencanaan hanya terdapat 2 kelas kesesuaian yaitu kesesuaian budidaya dan kesesuaian lahan untuk penyangga kawasan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 1.

Tabel 3. Hasil kesesuaian lahan tambak

No	Klasifikasi Fungsi Lahan	Luas (ha)	%
1	Budidaya	4.681,11	89,10
2	Lindung	572,74	10,90
	Total	5.253,86	100 %

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan perhitungan penetapan fungsi kawasan di Kecamatan Pajukukang diperoleh kelas kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman (terbangun), perikanan, pertanian dan lain sebagainya mencapai 4.681,11 ha atau sekitar 89,10% dari luas total kawasan, sisanya sekitar 572,74 ha atau hanya mencapai 10,90% merupakan kawasan lindung. Hal ini berarti bahwa Kecamatan Pajukukang merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan budidaya perikanan.



Gambar 1. Penetapan fungsi kawasan

Selanjutnya Indeks Kemampuan Lindung (IKL_{Pajukukang}) digunakan untuk memprediksi nilai keberlanjutan lahan pada kecamatan tersebut. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$IKL = \frac{4.681,11}{0,3x(4.681,11 + 572,74)} \times 100\%$$

$$IKL = \frac{4.681,11}{1.576,15} \times 100\%$$

$$IKL = 2,96$$

Dengan nilai IKL yang mencapai 2,96 maka kemampuan kawasan lindung wilayah di Kecamatan Pajukukang sesuai dengan penetapan fungsi kawasan berfungsi kurang atau belum optimal untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Tingkat Kesesuaian Budidaya Perikanan

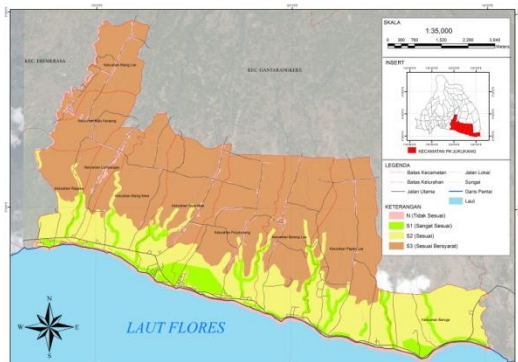
Peta kesesuaian lahan didapat melalui metode tumpang tindih delapan parameter kesesuaian lahan tambak dengan prosedur tiap-tiap parameter diberi bobot dan skor. Pemberian bobot masing-masing parameter didasarkan pada tingkat kepentingan suatu peruntukan lahan dalam hal ini untuk kesesuaian lahan tambak. Penggunaan lahan (*land use*) dalam proses pengolahan dijadikan sebagai faktor pembatas utama. Parameter land use memiliki bobot terbesar dalam pembobotan parameter. Penggunaan lahan suatu wilayah adalah suatu hal penting dalam penentuan lokasi kesesuaian lahan tambak.

Hasil kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya perikanan (tambak) dominan lahan dengan tingkat kesesuaian sesuai bersyarat (S3) yaitu daerah ini mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat perlakuan yang harus diterapkan, dengan luasan yang mencapai 3.188,30 ha. Selanjutnya tingkat kesesuaian S2 yaitu sesuai (*moderately suitable*) dimana mempunyai pembatas-pembatas yang agak serius untuk mempertahankan tingkat perlakuan yang harus diterapkan mencapai 1.424,37 ha atau 27,11 %. Sedangkan tingkat kesesuaian S1 dengan hasil yang sangat sesuai atau *highly suitable*(S1) mencapai 367,75 ha atau 7,00 %. Area ini tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan perlakuan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berpengaruh nyata. Sisanya sekitar 5,20% atau 273,44 ha dengan tingkat kesesuaian lahan N atau tidak sesuai (*not suitable*) area ini mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan perlakuan pada daerah tersebut. Selengkapnya disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 2.

Tabel 4. Hasil kesesuaian lahan tambak

No	Tingkat Kesesuaian	Luas (ha)	%
1	S1	367,75	7.00
2	S2	1424,37	27.11
3	S3	3188,30	60.68
4	N	273,44	5.20
Total		5253,86	100 %

Sumber : Hasil Analisis



Gambar 2. Kesesuaian lahan tambak

Hirarki Pengembangan Wilayah

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hirarki pengembangan wilayah di Kecamatan Pajukukang. Hirarki tersebut terdiri dari pusat pertumbuhan primer, yang menjadi pusat pelayanan utama kawasan didukung oleh sarana dan prasarana serta sistem jaringan transportasi yang lengkap diarahkan di Kelurahan Biangkeke. Pusat pertumbuhan utama berperan dalam pengembangan kegiatan permukiman, pusat produksi pengolahan perikanan, maupun kegiatan bercirikan perkotaan lainnya.

Kelurahan Lumpungan, Pajukukang, Borongloe, Nipa-nipa, dan Baruga diarahkan sebagai pusat pengembangan sekunder. Peranan pusat pertumbuhan sekunder adalah mengimbangi peran pusat kegiatan utama. Selain melayani masyarakat setempat juga dikembangkan dalam rangka melayani kelurahan yang berbatasan langsung.

Sedangkan Kelurahan Papan Loe, Rappoa, Batu Karaeng, dan Biang Loe mengalami tingkat perkembangan wilayah yang rendah. Sehingga diarahkan pada pusat pertumbuhan tersier, dimana secara geografis pelayanan kawasan hanya akan diarahkan dalam pelayanan lokal untuk masyarakat setempat. Kelurahan tersebut akan sangat tergantung pada pusat pertumbuhan sekunder dan primer. Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Hirarki perkembangan wilayah

No	Kelurahan	IPW
1	Biang Keke	287,7
2	Lumpungan	237,7
3	Pajukukang	221
4	Nipa-nipa	217,8
5	Baruga	191,1
6	Batu Karaeng	151,1
7	Biang Loe	141,1
8	Borong Loe	87,8
9	Rappoa	76,7
10	Papan Loe	74,4

Sumber : Hasil Analisis

Arahan Pemanfaatan Ruang

Alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka mengembangkan Kecamatan Pajukukang sebagai kawasan pengembangan perikanan budidaya antara lain :

1. Menetapkan alternatif lahan yang dapat diarahkan peruntukan fungsi lindung, karena nilai IKL yang belum optimal dengan indikator penetapan fungsi kawasan.
2. Mengoptimalkan lahan dengan nilai kesesuaian S1, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas budidaya perikanan ke depan.
3. Meningkatkan peran Kelurahan Biangkeke sebagai pusat pengembangan kawasan, yang terkait dengan rantai produksi hasil perikanan sehingga diperlukan peningkatan ketersediaan fasilitas dan utilitas pengembangan perikanan.

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, metode dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi kawasan peruntukan budidaya lebih dominan dan nilai IKLnya dalam kondisi yang kurang optimal
2. Kesesuaian lahan S1 dengan tingkat kesesuaian yang tinggi mencapai 367,75 ha.
3. Indeks perkembangan wilayah berada di Kelurahan Biangkeke yang mencapai nilai 287,7.
4. Arahan pemanfaatan lahan yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan alternatif lahan fungsi lindung, mengoptimalkan lahan nilai S1 serta meningkatkan peran Kelurahan Biangkeke sebagai pusat pengembangan.

Penelitian ini masih sangat terbatas terutama dari tingkat detail lahan yang diamati. Diperlukan pertimbangan pola ruang dari RTRW Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu indikator dalam menentukan arahan pemanfaatan lahan yang lebih optimal. Terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu, terutama mahasiswa Studio Perencanaan Tata Ruang Pesisir dan Kepulauan, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2014). *Bantaeng dalam Angka*. Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bantaeng*. Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Hardjowigeno S, Widiatmaka.(2001). *Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Tanah*. Fakultas Pertanian . IPB.
- Panjara, B. (2004). Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak di Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau*.
- Satria, A. (2009). *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Suparjo, M.N. (2008). Lingkungan Daya Dukung Perairan Tambak Desa Mororejo Kabupaten Kendal. *Jurnal Saintek Perikanan, 4(1)*.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 dan No. 683/KPTS/UM/8/1982 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.
- Sutanto, R. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Tanah Konsep dan Kenyataan*. Yogyakarta: Kanisius.